

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan

Received: July 29, 2020; Reviewed: October 1, 2020; Accepted: November 4, 2020.

To cite this article: Putra, AVP, 2020, 'Kepengaturan Tanpa Perlawanan Langsung: Program Pemetaan GPS Partisipatif di Taman Nasional Mae Tho Thailand', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6 no. 2, hlm. 249-261

Copyright: ©2020 Adrianus Venda Pratama Putra

All articles published in *Jurnal Bhumi* are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

**KEPENGATURAN TANPA PERLAWANAN LANGSUNG: PROGRAM PEMETAAN
GPS PARTISIPATIF DI TAMAN NASIONAL MAE THO, THAILAND***
**GOVERNMENTALITY WITHOUT DIRECT RESISTANCE: GPS PARTICIPATORY
MAPPING PROGRAM IN MAE THO NATIONAL PARK, THAILAND**

Adrianus Venda Pratama Putra

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Koresponden e-mail: vendapratama1@gmail.com

Abstract: Agrarian conflict between the Karen people and the Royal Forestry Department (RFD) in the northern Thailand has been going on for a long time. The root of the problem is that Karen tenurial rights are not recognized, even they lived there for hundreds of years. Their access to the forest also restricted because the area is included in the Mae Tho National Park. The conflict eventually subsided after the acceptance of the GPS participatory mapping program initiated by NGOs and the government. The program was well-received without significant resistance. The proof is that 80% of residents in the village where this research takes place agrees with the program. Some residents even boast of the program, even the program prohibits local residents from expanding their land beyond the land they have occupied for hundreds of years. Departing from the Michael Foucault framework of governmentality and ethnographic research method, there are seven reasons why the program could run effectively. First, land insecurity makes Karen people crave land recognition. Second, they accepted the idea of conservation due to the construction of marginality limits their choices. Third, migration reduces pressure on the land. Fourth, debt bondage. Fifth, the role of NGOs. Sixth, the use of local institutions and churches that campaign for program benefits. Seventh, the creation of a national park as a new economic space.

Keywords: GPS participatory mapping; governmentality; conservation; debt; local institutions; NGOs

Abstrak: Konflik agraria antara orang Karen dan *Royal Forestry Department* (RFD) di pegunungan utara Thailand telah berlangsung lama. Pangkal masalahnya ialah orang Karen yang telah ratusan tahun tinggal di sana tidak direkognisi hak tenurialnya dan hendak dibatasi aksesnya ke hutan karena wilayah tersebut masuk ke dalam Taman Nasional Mae Tho. Konflik tersebut akhirnya mereda pasca diterimanya program pemetaan GPS partisipatif yang digagas oleh LSM dan pemerintah. Program tersebut diterima dengan efektif tanpa perlawanan berarti. Buktinya adalah 80% warga di lokasi riset setuju dengan program tersebut. Beberapa warga bahkan membanggakan program tersebut. Padahal program tersebut melarang warga sekitar meluaskan lahannya di tanah yang telah dihuni selama ratusan tahun. Berangkat dari kerangka pikir kepengaturan Michael Foucault dan metode riset etnografi, ada tujuh alasan mengapa program tersebut bisa berjalan efektif. Pertama, insecurities atas tanah membuat orang Karen menginginkan rekognisi lahan. Kedua, konstruksi marjinalitas membatasi pilihan mereka sehingga ide konservasi harus diakomodasi. Ketiga, migrasi membuat tekanan atas tanah berkurang. Keempat, jerat hutang. Kelima, peran LSM. Keenam, penggunaan institusi lokal dan gereja yang mengkampanyekan manfaat program. Ketujuh, diciptakannya taman nasional sebagai ruang ekonomi baru.

Kata Kunci: Pemetaan GPS partisipatif; kepengaturan; konservasi; utang; institusi lokal; LSM

A. Pendahuluan

Ban Huay Bong atau “desa pinggir sungai” terletak di sub-distrik Mae Suek, kurang lebih 200 km dari kota Chiang Mai. Ban Huay Bon dan ratusan desa yang ada di wilayah dataran tinggi barat laut Thailand secara historis telah dihuni oleh orang Karen dan etnis minoritas lainnya. Selama puluhan tahun, komunitas yang tinggal di sini mengalami eksklusi hak-hak tenurial untuk mengelola dan mengakses lahan warisan nenek moyangnya, karena mereka dianggap tinggal dan hidup di wilayah hutan milik negara. Konflik panjang ini akhirnya diselesaikan melalui program pemetaan *Global Positioning System* (GPS) partisipatif yang selesai pada tahun 2014.

Pemetaan partisipatif merupakan peta alternatif yang dibuat oleh komunitas lokal yang disusun bersama pemangku kepentingan lain guna mengungkapkan pengetahuan geo-spasial atas ruang hidup mereka. Disebut partisipatif sebab setiap anggota komunitas secara sukarela aktif memberikan pengetahuan serta aktivitas seputar ruang hidup mereka yang dipetakan. Dalam konteks riset ini, orang-orang Karen yang dikenal sebagai peladang berpindah dan mendiami wilayah Taman Nasional Mae Tho dengan sukarela menunjukkan lahan-lahan yang telah dan sedang diolah sebagai ladang. Dengan mediator *Global Positioning System* (GPS), orang Karen menandai batas-batas teritori yang diklaim sebagai milik mereka, namun tidak pernah diakui oleh negara. Di Desa Ban Huay Bong tercatat 80% warga dari 180 orang yang terdata secara sukarela memberi informasi tentang lahan warisan nenek moyangnya kepada pemerintah melalui program pemetaan GPS partisipatif yang selesai dilaksanakan

pada tahun 2014. Hingga riset ini dilakukan pada pertengahan Juli 2019, tercatat tidak ada penolakan yang berarti terhadap program tersebut.

Aparatus negara di ranah lokal yang juga diisi oleh orang-orang lokal justru membanggakan keberhasilan program tersebut. Program pemetaan GPS partisipatif diyakini sebagai mekanisme terbaik dalam menyelesaikan sengketa lahan akibat kebijakan eksklusi negara terhadap hak-hak tenurial warisan nenek moyang orang Karen. Program ini diklaim mampu memperbaiki relasi antara negara dengan komunitas Karen yang selama beberapa dekade dipenuhi dengan sengketa tenurial. Dengan niat baik yang dibawanya, aparatus negara di ranah lokal, menganggap sebuah kewajaran apabila tidak ada perlawanan langsung terhadap program yang diwacanakan oleh orang di luar komunitas Karen ini. Dengan kata lain, program ini diterima dan dianggap mampu mengatasi permasalahan tenurial yang ada.

Sejauh penelusuran, belum ada penelitian yang membahas fenomena ini dengan kerangka pikir *governmentality* ala Michael Foucault (2008). Artikel tentang pemetaan GPS partisipatif rata-rata hanya membahas tentang arah konflik yang berubah dari komunitas adat *vis a vis* negara menjadi komunitas adat dengan tetangga desanya (Reyes-Gracia dkk 2012). Selain itu, riset lain perihal topik serupa membahas soal mengapa LSM dan akademisi selaku pihak eksternal komunitas begitu berminat dengan program pemetaan GPS partisipatif (Cochrane dkk 2014).

Michael Foucault (2008) menyatakan bahwa kekuasaan tersebar dimana-mana sehingga harus dikumpulkan jika kepengaturan ingin dilakukan. Dikumpulkannya kekuasaan ditujukan agar proses kepengaturan bisa berlangsung secara efektif dengan tanda mereka yang diatur merasa dilibatkan dan seolah-olah memiliki pilihan serta merasa membutuhkan kepengaturan sehingga dalam prosesnya kepengaturan bisa terjadi tanpa resistensi langsung. Fenomena inilah yang ditemukan di Ban Huay Bong.

Dengan bantuan institusi lokal, program pemetaan GPS partisipatif bisa berjalan secara

* Artikel ini merupakan bagian dari tesis saya di Department Antropologi Budaya yang berjudul: “Penerbitan Tanpa Perlawanan Langsung: Studi Pemetaan GPS Partisipatif di Mae Chaem, Thailand”. Tesis ini telah diujikan dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dengan dewan penguji Dr Agung Wicaksono, Dr Pujo Semedi, dan Dr Pande Made. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada ketiga guru saya tersebut, dan kepada partner riset lapangan sekaligus inspirator topik riset dan pembimbing saya Dr Agung Wicaksono, serta Dewi Yasinta, teman riset saya.

efektif tanpa perlawanan langsung. Dalam konteks studi etnografi, model *governmentality*, diterjemahkan oleh Tania Li (2012) sebagai kepengaturan. Dalam konsep Li, kehendak untuk memperbaiki dari pihak eksternal membutuhkan serangkaian teknikalisis program yang melibatkan kekuasaan di ranah lokal sebagai agen-agen yang bertugas mempermudah diterimanya program-program yang diklaim sebagai "kehendak untuk memperbaiki". Oleh sebab itu, dalam artikel ini digunakan kerangka pikir tersebut untuk mencari tahu mengapa program pemetaan GPS partisipatif bisa diterima dengan efektif tanpa perlawanan langsung dari warga Ban Huay Bong.

Bahan empiris yang mendasari penulisan artikel ini berasal dari riset lapangan yang dilakukan selama 12-29 Juli 2019 di Desa Ban Huay Bong, Sub-distrik Mae Suek, Distrik Mae Chaem, Provinsi Chiang Mai, Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode partisipasi observasi dan wawancara mendalam, layaknya riset etnografi. Selain partisipasi dan wawancara, tambahan data yang bersifat historis juga diperoleh melalui studi pustaka.

B. Konstruksi Marjinalitas Orang Karen

Orang Karen merupakan salah satu komunitas adat di Thailand. Mereka disebut sebagai komunitas adat karena memenuhi beberapa prasyarat yaitu: 1) sudah tinggal di suatu teritori sebelum negara modern terbentuk; 2) memiliki nilai dan kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat dominan; 3) mewariskan seperangkat nilai, aturan, dan hukum kepada generasi penerusnya; 4) memiliki ikatan kultural yang kuat dengan tanahnya (UNHCR 2013). Di Thailand, Karen adalah etnis minoritas dan termarjinalkan. Marjinalitas etnis ini tidak hanya tergambar dari wilayah tinggal mereka di dataran tinggi dan populasi yang sedikit, tetapi juga agama yang berbeda dengan mayoritas orang Thai, yakni Budha. Mayoritas orang Karen di Mae Chaem menganut agama Kristen Baptis. Sebelum tahun 1997, mereka juga dianggap sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah Thailand, sehingga tidak bisa keluar dan menetap di luar wilayah distrik mereka

dan tidak mendapat akses pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang setara warga negara beretnis Thai (Delang 2003).

Marjinalitas orang Karen membuat mereka memiliki pengetahuan yang kurang tentang sirkulasi keuangan dan posisi yang rentan saat menjalin relasi dengan orang Thai, etnis dominan di Thailand. Pada akhirnya, saat kaum Thai mulai berpindah di sekitar kediaman mereka pada tahun 1970-an untuk menanam *cash-crop*, orang Karen yang semula berpola pertanian ladang berpindah subsisten pun tertarik. Mereka kemudian ikut menanam *cash-crop* sayur-sayuran dan kedelai dengan cara berhutang ke orang Thai untuk membeli alat produksi seperti pupuk kimia yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Hutang membuat mereka bergantung ke pasar. Hingga kini, saat sumber utang lebih divergen, karena perusahaan, negara, dan bank juga bisa menjadi kreditur, utang masih menjerat mereka untuk beberapa kebutuhan seperti: pembelian kendaraan pengangkut hasil pertanian dan biaya sekolah anak. Perbandingan jumlah hutang dan pendapatan bahkan menjadi salah satu klasifikasi kelas di desa yang semua warganya memiliki akses dan hak pakai ke tanah ini.

Dalam konteks warga lokal Ban Huay Bong, golongan miskin adalah mereka yang memiliki lahan seluas 15-20 rai¹, memiliki pendapatan sebesar 40.000-80.000 Bath per tahunnya, dan menanggung rasio hutang yang tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan. Sebagian besar warga desa termasuk ke dalam golongan ini. Sementara itu, kelas menengah desa jumlahnya sedikit, tidak sampai seperempat dari total penduduk desa. Kelas menengah biasanya memiliki lahan di atas 20 rai, memiliki penghasilan sekitar 100.000-300.000 Bath per tahunnya, dan masih menyisakan jumlah uang cukup banyak setelah dipakai untuk membayar hutang. Akan tetapi, kedua kelas ini tidak mungkin kelaparan seperti kaum miskin kota, karena memiliki persediaan beras dan ternak ayam untuk menjamin

¹ Rai merupakan satuan pengukuran di Thailand. 1 rai setara dengan 0.16 hektare.

kebutuhan subsisten mereka. Mereka dianggap lebih miskin dibanding orang kota, karena tidak memiliki tabungan, namun lebih beruntung dibanding orang-orang miskin di perkotaan yang sering kelaparan karena tidak mampu membeli makan. Dengan demikian, kemiskinan dimaknai sebagai kemiskinan yang tercipta akibat relasi dengan pasar.

Relasi antara orang Ban Huay Bong dengan pasar membuat mereka miskin karena harus hidup dalam sirkulasi hutang demi memenuhi kebutuhan non-subsisten, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menabung. Tanpa hutang mereka tidak bisa hidup dalam proses produksi dan reproduksi sehari-hari. Dalam *Debt and Vulnerability: Indebtedness, Institutions and Smallholder Agriculture in South India* (2018), pemakaian ini menandakan mereka masuk ke dalam orang-orang yang rentan. Intervensi pasar kapitalistik membuat orang-orang desa bergantung dengan hutang dari bank, perusahaan, atau orang kuat lokal guna membeli pupuk kimia, kebutuhan menyekolahkan anak, hingga kendaraan pengangkut komoditas tani. Hal ini merupakan representasi ketersingkirkan komunitas tani di pedesaan akibat penetrasi kapitalisme yang berpusat di perkotaan.

Tabel. 1. Klasifikasi Kelas di Ban Haey Bon

Luas Lahan	Pendapatan	Proporsi Utang terhadap pendapatan	Status Sosial
15-20 rai	40.000-80.000 Bath	1/2-1/3	Miskin
> 20 rai	100.000-300.000 Bath	1/3-1/2	Menengah

Sumber: Data primer 2019

Selain ekonomi dan budaya, konstruksi marginalitas juga merugikan mereka dalam relasi politik dengan negara. Konstruksi marginalitas juga membuat orang Karen mendapat stereotip negatif sebagai *kho pa* (orang hutan) dan perusak hutan. Hal ini terjadi akibat praktik rotasi perladangan yang mereka gunakan dianggap merusak lingkungan. Tinggal di agroekosistem pegunungan dengan kepadatan populasi yang rendah memungkinkan orang Karen menjalankan praktik ladang berpindah atau yang oleh

publik dan pemerintah Thailand disebut sebagai *ra lu 'an 'loy*. Dalam sistem ini, hutan primer dibuka, pohon besar, dan semak-semak dipotong untuk kemudian dibakar setelah cukup kering. Hasil pembakaran menambah nutrisi tanah. Lahan ini kemudian ditanami untuk satu atau dua musim sebelum kesuburan tanah terdegradasi atau rumput menutup lahan. Lahan kemudian dirotasi dengan model ladang pertama digunakan selama 7 tahun, ladang kedua dan ketiga selama 5 dan 3 tahun, ladang keempat selama 3 tahun, lalu kembali lagi ke ladang pertama.

Diskusi mengenai sistem perladangan telah banyak dikemukakan. Sebagian berargumen bahwa ladang merupakan sistem pertanian yang tidak hanya adaptif terhadap kondisi suatu agroekosistem, tetapi juga efisien karena tidak memerlukan masukan tenaga dalam jumlah besar sehingga dapat berkesinambungan (Dove 1993; Schmidt-Vogt 1998). Sepertinya, kelompok ini terjebak pada romantisasi masyarakat tradisional dan terisolir. Sebagian ilmuwan lain yang tidak percaya dengan romantisasi masyarakat tradisional dan terisolir, melihat bahwa sistem perladangan yang ekstensif dan cenderung sembrono berpotensi mendegradasi lingkungan dan menghasilkan masalah ekologis yang serius (Rambo 1981; Kartika dkk 2009).

Diskursus mengenai sistem perladangan tersebut bukan tanpa implikasi. Akibat penetapan taman nasional di sebagian besar wilayah subdistrik Mae Cham, para peladang dianggap sebagai pemangsa hutan (Santasombat 2004). Istilah derogatif *ra lu 'an 'loy* atau ladang berpindah kemudian digunakan pemerintah untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan mereka untuk mengusir orang Karen dari lahan mereka meskipun pengusiran ini tidak sepenuhnya berhasil.

Menghadapi tuntutan serius sebagai perusak hutan, orang Karen tidak tinggal diam. Dengan bantuan LSM sebagai agen advokasi, mereka memanfaatkan modal budaya yang ada dengan mengatakan bahwa mereka adalah anak dari hutan, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik atas persoalan pengelolaan hutan dibanding pemerintah. Mereka juga mengubah wacana *ra*

lu 'an 'loy yang bermakna derogatif menjadi *raimun wian* yang artinya rotasi perladangan, kembali ke ladang awal setelah membuka empat plot. Meskipun demikian, relasi antara negara dan orang Karen tetap ambivalen dan penuh kecurigaan karena keduanya memiliki cara pandang berbeda tentang pengelolaan hutan.

Di tengah ambivalensi ini, muncullah program pemetaan partisipatif. Awalnya program ini diinisiasi oleh LSM Raks Thai Foundation. Konteks munculnya program ini ialah pihak pemerintah menganggap praktik ladang berpindah yang dilakukan oleh orang Karen di masa lampau merusak hutan, sehingga harus dilarang. Orang-orang Karen tidak bisa membuka lahan di ladang yang dulu pernah ditempatinya karena mereka telah kembali menjadi hutan. Orang-orang Karen tentu tidak bisa menerima perspektif tersebut. Mereka menganggap pemerintah tidak paham lokalitas mereka dalam mengelola lahan. Di tengah kegundahan ini, LSM Raks Thai Foundation menawarkan program pemetaan GPS partisipatif agar warga lokal bisa lebih mudah bernegosiasi dengan pemerintah. Mengingat Raks Thai Foundation sudah bekerja bersama mereka sejak 1979 dengan nama lamanya yakni Karen Care, maka wacana program tersebut diterima. Apalagi dalam prosesnya, Raks Thai Foundation juga menggunakan jasa tokoh Komite Desa dalam proses sosialisasi dan juga menggunakan jasa warga lokal sebagai asisten pemetaan GPS yang bertugas melakukan pencatatan terhadap siapa pemilik lahan, berapa luasnya, dan di mana lokasinya.

Pemetaan GPS partisipatif yang dilakukan oleh warga lokal, LSM Raks Thai Foundation dan pemerintah lokal (TAO) ini juga tidak serta-merta, mengakui hak atas semua lahan hutan yang telah dibuka menjadi ladang. Ladang atau bekas ladang tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan tahun membuka hutan, yaitu: pra-2012, antara 2012-2014, dan setelah 2014. Hanya ladang yang dibuka sebelum tahun 2012 yang memperoleh sertifikat hak guna. Pada periode antara 2012-2014, hutan boleh dibuka menjadi ladang namun hanya boleh ditanami

kayu untuk kebutuhan subsisten dan membuat rumah. Lahan yang dibuka setelah tahun 2016 harus dihutankan kembali. Informasi ini kemudian dicatat ke dalam peta resmi yang dapat diakses melalui internet di laman geografi milik pemerintah.

Aktivitas pencatatan dengan GPS ini membuat seluruh lahan pertanian yang menurut pemerintah berada di kawasan yang diberi nama Taman Nasional Mae Tho ini dapat diidentifikasi berdasarkan: luas, nama, agama, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, dan jenis tanamannya. Dengan pencatatan ini, klasifikasi dan batas lahan menjadi lebih jelas dan dapat diukur oleh pemilik lahan atau pun pemerintah

Orang-orang Karen sadar bahwa setelah pemetaan selesai, segala aktivitas pertanian mereka terpantau dengan detail, siapa pemilik lahan, berapa luasnya, di mana lokasinya, bahkan hingga jenis tanamannya dengan imbalan hak pakai selama 5 tahun dari pemerintah. Sekitar 80% penduduk Karen yang tinggal di Ban Huay Bong setuju dengan program ini. Hampir semua penduduk desa yang diwawancarai mengatakan bahwa pemetaan ini menguntungkan karena pemerintah mengakui klaim penduduk atas ladang-ladang tersebut melalui penerbitan sertifikat. Untuk melihat mengapa kepengaturan akses melalui program pemetaan GPS partisipatif ini berhasil, perlu dilihat konjungtur sosial, ekonomi, dan politik, yang berlangsung dalam beberapa dekade terakhir.

C. Menguatnya Penguasaan Negara dan Pasar

Praktik penguasaan hutan oleh negara dimulai pada tahun 1896 dengan dibentuknya otoritas kehutanan Thailand yaitu *Royal Forestry Department* (RFD) dan terintegrasinya Chiang Mai dari kerajaan La Na ke kerajaan Siam (Laungamrasi 2000). Dengan dibentuknya lembaga tersebut, praktik pengelolaan hutan modern yang bercorak utilitarian ala Jerman diterapkan di Thailand. Fase ini menandakan berubahnya konstruksi *pa* (hutan) oleh pemerintah Thailand. Jika sebelumnya hutan dikonstruksikan oleh pemerintah,

jajaran kerajaan, dan orang Thai sebagai *terra incognita* yang misterius, sakral, dan hanya diakses oleh orang-orang liar atau biksu yang berniat mencari asketisme spiritual, kini hutan memiliki fungsi komersial dan bercorak utilitarian yang dalam bahasa Thai disebut *pa mai* (hutan kayu) (Chamaichom 1978).

Perubahan ini tak bisa lepas dari dimulainya pembangunan *muang* (kota) di Thailand sejak tahun 1800. Pembangunan menjadikan hutan sebagai wilayah komersil baru yang harus dieksploitasi demi keuntungan ekonomi Komunitas *Muang*. Dengan konstruksi baru ini maka rezim konstruksi pengetahuan ilmiah juga berubah. Jika sebelumnya orang-orang yang tinggal di sekitar hutan pegunungan tinggi relatif otonom, maka pasca terbentuknya RFD, konstruksi terhadap apa dan bagaimana hutan harus dikelola dipegang oleh RFD. Akan tetapi, pemaknaan tersebut belum masuk ke orang-orang Karen.

Pada mulanya, walau tanah tempat tinggal orang Karen dianggap masuk ke dalam lahan milik kerajaan yang ingin dikelola secara komersial, orang Karen masih leluasa berpindah desa dan memanfaatkan hasil hutan. Tidak mengherankan apabila Desa Ban Huay Bong bisa terbentuk pada tahun 1920-an dari para migran. Dibalas-kannya orang Karen mengakses hutan memang bertentangan dengan regulasi. Akan tetapi, orang Karen bisa dimanfaatkan sebagai tenaga kerja gratis oleh perusahaan kayu dari Inggris karena uang belum terlalu mereka butuhkan. Kebutuhan hidup sehari-hari orang Karen masih dipenuhi oleh komunitas desa (Laungaramsri 2000).

Perubahan pemaknaan terhadap hutan kembali terjadi pada tahun 1970-an. Orang-orang Karen dan etnis minoritas pegunungan lain mulai mengenal tanaman komersial dari orang-orang Thai. Mereka mendapat tanaman ini dengan cara berhutang, akibatnya mereka harus memperluas lahan komersil mereka. Akibatnya lahan-lahan warisan nenek moyang yang untuk sementara ditinggalkan dan berubah menjadi hutan heterogen diolah menjadi lahan komersil. Hal ini terjadi karena tekanan untuk membayar hutang. Penanaman tumbuhan komersil tentu berbeda

dengan tanaman subsisten. Dalam tanaman komersil penggunaan pupuk kimia meluas, akibatnya degradasi lahan dan kekurangan air bagi orang-orang Thai di dataran rendah mulai muncul.

Pada akhirnya orang Karen mulai dilabeli sebagai perusak hutan. Momentum pelabelan ini muncul di saat kelas menengah Thailand mulai menyukai ide konservasi dan penghijauan di tahun 1970an-1980-an. Bagi mereka hutan seharusnya hadir sebagai penyangga kebutuhan air dan lingkungan, bukan ruang produksi bagi manusia. Sejak itu pula, pelabelan *ra lu 'an 'loy* mulai bermakna derogatif. Konsep *ra lu 'an 'loy* sendiri merupakan konstruksi pemerintah Thailand terhadap orang-orang yang mempraktikkan ladang berpindah dengan metode *slash and burn*. Dulunya konsep ini bernilai netral. Orang-orang Thai yang dulu ingin menghindar dari kewajiban pajak dan belum memiliki tradisi pembuatan saluran irigasi juga mempraktikkan ladang berpindah. Konsep ini mulai menghilang pasca ditemukannya konsep irigasi persawahan dan penciptaan *muang* (kota). Sejak itu, konsep *ra lu 'an 'loy* dianggap mewakili dunia masa lalu yang harus ditinggalkan, karena ketinggalan zaman dan tidak dapat memberi keuntungan ekonomi bagi negara. Hal ini terjadi karena model lahannya yang terus berpindah dan sulit diprediksi.

Di tahun 1980-an, penilaian publik Thailand atas konsep tersebut juga berubah. Konsep tersebut tidak semata menjadi simbol masa lalu, tapi juga simbol kerusakan lingkungan—terutama hutan dan air. Publik menilai konsep tersebut merupakan simbol dari perusakan hutan, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, dan perusakan sumber konservasi air akibat praktik ladang berpindah. Cap negatif ini semakin kuat pada akhir tahun 1980an karena di sisi selatan Thailand terjadi banjir akibat penggundulan hutan. Pada tahun 1989 kawasan hutan Mae Chaem dengan landasan peraturan menteri BE 2517 dianggap sebagai teritori hutan kelas 1A yang berfungsi sebagai perlindungan keberagaman flora dan fauna, serta konservasi air. Pada akhirnya, industri ekstraktif kayu jati dan akses manusia dilarang.

Wacana derogatif semacam inilah yang justru memungkinkan LSM Karen Care, yang pada tahun 1997 berubah menjadi LSM Raks Thai Foundation, datang ke Mae Chaem. Bersama dengan LSM-LSM lain yang beroperasi di Mae Chaem, mereka memelopori pergeseran wacana ini sebagai medium advokasi oleh dan untuk etnis pegunungan di pegunungan sisi utara Thailand yang bergabung ke dalam jaringan petani pegunungan utara. Wacana *rai mun wian* sendiri diambil dari konsep tradisonal dari orang Karen. Berbeda dari *ra lun an loy* yang berangkat dari konsep tradisional Thai, *rai mun wian* berangkat dari tradisi dan praktik hidup orang Karen di masa lampau.

Menurut Prasert Trakansuphakon (1997), istilah *rai mun wian* (pertanian rotasi atau rotasi ladang), mengacu pada sistem pertanian yang dipraktikkan oleh orang Karen dan Lua. Dalam model ini, pola penggunaan lahan pembudidayaan dilakukan dalam waktu singkat sementara lahan kosong dibiarkan pulih untuk waktu yang lama. Beberapa lahan kosong kemudian telah kembali ke hutan. Asumsi dasar dari *rai mun wian* ialah produksi subsisten. Oleh sebab itu, LSM dan masyarakat setempat menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam sistem ini adalah "sehat secara ekologis". Dengan kata lain, komunitas setempat mulai menerima wacana ekologis yang dipopulerkan oleh para konserver hutan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepengaturan makna yang dilakukan oleh aktivis LSM. "Kepengaturan" makna ini disambut oleh komunitas setempat karena dianggap bisa memenuhi kepentingan dan harapan mereka dalam mengakses lahan warisan nenek moyang yang diklaim dan dikuasai oleh negara .

Harapan yang besar ini di Mae Chaem sempat diwujudkan dalam pembentukan peta-peta alternatif beraksara Karen dan Thai yang dikirim ke petugas-petugas RFD oleh serikat petani pegunungan utara (Laungaramsri 2000). Namun pada kenyataannya, aspirasi tersebut masih ditolak. Baru pada tahun 2009 RFD, mereka bersedia menerima usulan LSM Raks Thai Foundation untuk menerapkan praktik pemetaan alternatif berbasis GPS di Mae Chaem. Salah satu penyebab

ditolaknya wacana tersebut ialah anggapan pihak RFD bahwa orang Karen kini sudah komersial karena ciri-ciri tradisonalnya telah hilang. Hal ini dibuktikan dari luas lahan jagung yang menjadi komoditas baru di Mae Chaem sejak awal tahun 2000-an sudah lebih luas dibanding lahan padi subsisten (Walker & Forysth 2007). Meningkatnya luasnya lahan komersial disebabkan oleh suku-suku minoritas di Mae Chaem yang semakin bergantung pada uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang digunakan untuk membiayai sekolah anaknya dan memenuhi kewajiban dalam sirkulasi hutang.

Implikasi dari pemetaan GPS partisipatif ialah hadirnya klasifikasi lahan yang jelas dan rigid oleh pemerintah. Berulangkali pihak pemerintah dan Raks Thai Foundation mengatakan bahwa pemetaan GPS partisipatif yang lebih mudah proses pengawasannya, sekaligus rigid dan klasifikatif sangat penting bagi keberlanjutan program konservasi yang melibatkan komunitas lokal. Akan tetapi, juga ada faktor lain yang harus diperhitungkan yakni pengukuran melalui pemetaan GPS partisipatif dapat menghasilkan batas-batas tanah yang lebih jelas bagi warga setempat.

Sebagian besar warga lokal ternyata mendukung rasionalisasi tersebut selain alasan menjaga hutan yang memang sudah diterima sebagai konsekuensi dari kepengaturan wacana dari LSM. Pengaturan konsumsi rumah tangga yang kalkulatif dengan cara mengetahui batas-batas lahan secara lebih rigid, dibutuhkan sebab pengeluaran uang untuk konsumsi rumah tangga melalui hutang semakin besar. Mereka tak bisa lagi sepenuhnya bergantung ke komunitas. Oleh sebab itu, kepengaturan diterima karena relevan dengan konteks ekonomi-politik neoliberal di Thailand yang menempatkan tanggungjawab kesejahteraan di tangan keluarga atau individu dan membuat mereka semakin bergantung ke pasar (Harvey 2005, Khoo 2010).

D. Kuasa Lokal dan Efektivitas Pemetaan GPS Partisipatif

Restriksi yang dialami oleh orang Karen karena ideologi konservasi dari RFD memunculkan

resistensi. Bagi mereka, hutan merupakan ruang produksi, bukan sekadar konservasi. Pada tahun 1989, bersama dengan etnis minoritas pegunungan yang lain seperti Hmong dan Luho, mereka membentuk Serikat Petani Pegunungan Utara. Dengan bantuan LSM, mereka mendemo pemerintah untuk menuntut akses ke hutan yang diklaim sebagai lahan milik negara (Peluso 1995). Namun demikian, sejak aksi tersebut, orang-orang pegunungan menamai diri mereka sendiri sebagai *indigenous people*, bukan lagi *kho pa* yang bermakna derogatif.

Aksi massa kembali dilakukan oleh serikat petani pegunungan utara di tahun 1993-1995. Kali ini aksi yang aspirasinya lebih besar dan umum ini dilakukan bersama masyarakat sipil lain yakni mahasiswa sambil tetap menggandeng LSM. Mereka menuntut amandemen konstitusi yang menghadirkan demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan agar kekuasaan di ranah lokal juga diberi hak untuk mengelola sumber daya. Tuntutan ini pada akhirnya berhasil.

Pada tahun 1995 dibentuk *Tambon Administrative Organization* (TAO) yang menjadi dewan perwakilan desa di tingkat sub-distrik. Mereka diberi otonomi untuk mengelola masalah keagamaan, konservasi, dan sumber daya. Di tingkat desa juga ada institusi baru yakni Komite Desa dengan tugas serupa seperti TAO, namun tatarannya lebih mikro dan memiliki wewenang sebagai penjamin bagi warga lokal yang mau berhutang ke institusi resmi. Anggota dari kedua komite ini adalah orang dengan pendidikan minimal sarjana yang dipilih langsung oleh warga desa dengan metode *one man one vote*. Anggota dari dua institusi ini memiliki masa jabatan lima tahun per periode dan masih bisa diperpanjang satu periode jabatan lagi.

Di Mae Chaem yang mayoritas penduduknya merupakan etnis minoritas, pembentukan lembaga ini baru efektif berjalan pasca pembentukan konstitusi 1997 yang membuat etnis minoritas di pegunungan mendapat hak setara dengan warga negara Thailand lainnya. Sejak itu mereka memiliki representasi politik di TAO dan Komite Desa. Di Ban Huay Bong, anggota TAO dan Komite De-

sa biasanya merupakan sosok yang dekat dengan gereja, karena sebelum negara hadir dan sanggup memberi akses pendidikan, gerejalah yang memberi beasiswa dan pekerjaan sampingan kepada mereka. Orang-orang ini merupakan kelas menengah yang berpengaruh di Ban Huay Bong.

Selain pembentukan institusi lokal, konstitusi 1997 juga membuat semakin banyak orang Ban Huay Bong yang bermigrasi ke kota untuk bekerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dijumpai bahwa dalam satu keluarga biasanya lebih dari separuh anggotanya bekerja di kota. Mereka tidak mau lagi jadi petani karena merasa insecurities yang tinggi terhadap pekerjaan ini. Hal ini juga disebabkan sejak konstitusi tersebut ditetapkan, tingkat pendidikan orang Karen semakin tinggi dan hutang dari institusi formal sebagai modal merantau semakin mudah didapatkan. Ditemukan kecenderungan bahwa anggota keluarga yang berusia 20-35 tahun lebih memilih untuk bermigrasi dan bekerja di luar sektor pertanian. Dengan kata lain, demografi yang bergantung ke pertanian berkurang, sehingga tidak lagi terjadi kelaparan terhadap tanah (Li 2007; Chayanov dalam Bernstein 2009).

Program ini sendiri mulai diwacanakan oleh Raks Thai pada tahun 2005 dan kemudian diusulkan ke TAO. TAO menyetujuinya karena dianggap masuk akal dan cukup realistis dalam menyelesaikan konflik agraria yang berlarut antara RFD dan komunitas lokal di Mae Chaem. Mereka juga melihat adanya celah berupa konflik antara institusi negara di ranah nasional. Tidak ditemukan konflik institusional seperti apa yang menjadi celah. Namun konteks politik ketika itu Thailand sedang dipimpin oleh rezim militer yang otoriter. Terjadi konflik antara RFD dan *Agricultural Land Reform Act of 1975* (ALRA). ALRA merupakan institusi negara yang ditugaskan untuk melakukan reforma agraria. ALRA dibentuk pasca aksi massa besar-besaran di Thailand pada tahun 1973-1976. Kelahirannya juga seiring dengan kemenangan kaum komunis di Vietnam. Pembentukan institusi ini berkaitan dengan upaya mencegah masuknya pengaruh komunis kepada kaum tani di Thailand.

Menurut Gine (2012), ALRA sering berbeda pendapat dengan RFD dalam konteks konservasi hutan. ALRA cenderung lebih inklusif dan mengizinkan sebagian kawasan hutan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan status hak pakai. Hak pakai hadir selama 5 tahun yang bisa diperpanjang selama lahan tersebut masih dipakai sebagai lahan pertanian. Konsep ini juga yang dipakai dalam klausul pemetaan GPS partisipatif. Pihak TAO menjelaskan bahwa program ini bisa masuk ke dalam skema konservasi sekaligus pemenuhan hak agraria. Ada sekitar 12,000 orang Mae Suek yang terlibat dalam pencatatan. Pasca pencatatan mereka akan mendapat sertipikat hak pakai selama 5 tahun dan bisa diperpanjang selama lahan tersebut masih menjadi area pertanian. Lebih dari itu, mereka juga bisa mendapat subsidi dan bantuan dari pemerintah jika ada bencana yang merusak lahan mereka. Sertipikat ini bisa diwariskan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan.

TAO tidak sendirian dalam menyampaikan program ini ke desa-desa di Mae Suek. Mereka menggandeng Komite Desa sebagai agen sosialisasi. Komite Desa juga menggandeng warga lokal sebagai *surveyor* dan pencatat yang bekerja bersama LSM Raks Thai atau *Impact*. Khusus di Ban Huay Bong yang bekerja adalah LSM Raks Thai. Komite Desa datang dan menyampaikan pesan ke warganya bukan tanpa intensi. Menurut salah seorang anggota TAO, pihak Komite Desa didorong untuk membuat orang-orang Ban Huay Bong setuju dengan program pemetaan GPS partisipatif. Mereka ditugaskan untuk mengkonstruksi bagaimana program pemetaan partisipatif dapat membuat orang-orang Ban Huay Bong memiliki relasi dengan kekayaan yang bisa timbul akibat akses mereka ke lahan warisan nenek moyang yang direkognisi oleh negara dan batas-batasnya menjadi lebih jelas. Mereka juga diminta ikut menjaga hutan dan tidak membatnya pasca rekognisi diakui, karena dengan dijaganya hutan air tetap terjaga. Jika menolak maka lahan warisan orang tua mereka akan dikembalikan menjadi hutan. Tugas ini sejalan dengan gagasan Foucault (2008) bahwa dalam proses kepengaturan, relasi-relasi antara orang

yang ditertibkan dengan sesuatu yang menjadi tujuan kepengaturan harus dikonstruksikan secara persuasif agar tercipta norma baru yang seolah penting bagi yang ditertibkan. Oleh sebab itu, pemetaan GPS partisipatif harus dikonstruksi sebagai sesuatu yang penting dan mendesak bagi warga Ban Huay Bong.

Permasalahannya kemudian, model pendekatan persuasif tidak bisa berjalan mudah jika perbedaan kultural antara “pengatur” dan “yang diatur” untuk merealisasikan aspirasi “penertib” terlampau jauh. Anggota TAO Mae Suek yang terdiri dari perwakilan dari tiap desa di Mae Suek yang terdiri dari beragam etnis minoritas—tidak hanya Karen semata—tentu tidak mampu menjalankannya secara efektif. Dengan demikian, kekuasaan di ranah paling mikro dan memiliki fungsi birokrasi—selaku institusi negara—harus dioperasionalkan dalam mensosialisasikan program kepengaturan berbentuk pemetaan GPS partisipatif. Nalar dari digunakannya Komite Desa ialah pemerintah harus mengoperasikan model pengaturan sosial yang dapat menciptakan hasrat, habit, dan sistem kepercayaan yang relevan dengan kepentingan nasional yang lebih efektif bila dijalankan oleh aktor-aktir pemilik kekuasaan di ranah lokal (Foucault dalam Li 2007).

Operasionalisasi di ranah mikro dengan menggunakan Komite Desa demi menciptakan *habit* dan norma baru menjadi semakin relevan karena anggota Komite Desa banyak juga yang menjadi anggota Komite Gereja. Lembaga gereja memiliki otoritas moral kuat bagi warga Ban Huay Bong karena mampu menafsirkan dan menyampaikan otoritas kebenaran agama. Hal ini tentu sesuai dan efektif untuk digunakan mengingat 100% warga Ban Huay Bong beragama Kristen denominasi Baptis dan gereja juga memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan baru mereka yakni sekolah. Beruntung Komite Gereja mendukung ide konservasi dan pemetaan GPS partisipatif sehingga wacana di antara kedua institusi tersebut tidak kontradiktif.

Selain itu, Komite Desa juga memegang peranan penting dalam sirkulasi utang yang menjadi salah satu struktur pokok perputaran uang di Ban

Huay Bong. Orang-orang Ban Huay Bong lebih memilih berhutang dengan menggunakan jasa Komite Desa dibanding langsung berhutang ke orang Thai atau perusahaan karena tidak perlu terjebak dengan bagi hasil panen. Hal ini wajar, sebab jika meminjam dari perusahaan atau orang Thai mereka tidak membutuhkan jaminan, tetapi bagi hasil pertanian yang akan dipotong pada masa panen. Akan tetapi, jika mereka membutuhkan uang untuk biaya pendidikan, mereka tidak bisa meminjam ke perusahaan. Satu-satunya institusi yang bisa meminjam uang dalam jumlah besar dan cepat ialah bank.

Masalahnya, bank membutuhkan penjamin bahwa uang yang dipinjam akan dikembalikan. Di Mae Chaem, aktor yang diizinkan menjadi penjamin ialah anggota Komite Desa. Seseorang yang pernah meminjam uang ke bank, menggunakannya untuk keperluan sekolah anak dan membeli motor. Minimal ada 3 orang penjamin dari Komite Desa. Mereka secara bergantian akan menjadi penjamin bagi warga lokal yang membutuhkan uang dalam waktu cepat. Kuasa Komite Desa cukup besar sehingga peran mereka sebagai penertib dapat terlegitimasi di ranah lokal. Dengan kata lain, pelibatan Komite Desa sebagai lembaga yang ikut menertibkan orang-orang Ban Huay Bong agar mau mendaftarkan tanahnya dalam program pemetaan GPS partisipatif terbukti efektif. Saat diadakan pemungutan suara, 80% warga setuju dengan program pemetaan GPS partisipatif. Mereka rata-rata berasal dari kelas bawah atau kelas menengah yang tidak terlampaui makmur. Pernyataan persetujuan dari warga muncul karena kebutuhan untuk pengukuran yang lebih jelas terkait lahan sekaligus mendapatkan rekognisi atasnya. Selain itu, mereka juga ingin menjaga hutan karena penting untuk persebaran air. Adapun 20% sisanya, rata-rata berasal dari kelas menengah yang cukup makmur, namun tidak mampu berbuat banyak untuk menolak karena mayoritas warga setuju. Selain itu, jika mereka menolak, RFD akan turun tangan dan mengubah lahan mereka menjadi hutan.

Pasca pemetaan partisipatif, pengawasan juga dilakukan oleh Komite Desa dengan dibentuknya

komite konservasi di dalam struktur Komite Desa. Tugas mereka ialah melaporkan warga desa ke RFD jika masih ada warga yang memperluas lahan di luar teritori lahan yang digarap. Sanksi yang diberikan oleh RFD kepada warga yang masih memperluas lahan di luar wilayah garapannya—terutama dengan cara menebang pohon di taman nasional—ialah sanksi uang sebesar 10.000 Bath atau dikirim ke penjara. Jika sanksi tersebut dijatuhkan, ada pertanda kekuasaan di ranah lokal sudah tidak mampu lagi mengikuti aspirasi negara. Oleh sebab itu, ancaman dari negara akan dioperasikan sebagai ‘pengancam’ yang represif agar kepengaturan tetap bisa terlaksana (Li 2007).

F. LSM, Kepengaturan Akses, dan Ekowisata

Pelibatan LSM juga dibutuhkan dalam program pemetaan GPS partisipatif karena ia memiliki rekam jejak yang terpercaya bagi warga setempat. Selain itu, LSM juga memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam hal ini. Akan tetapi, ada satu hal lain yang membuat kehadiran mereka masih dibutuhkan. Menurut Khan, (2008) praktik kepengaturan demi tujuan konservasi selalu menekankan pentingnya penciptaan hegemoni pengetahuan yang membuat praktik konservasi harus dilakukan. Berangkat dari tradisi pemikiran Post-Marxist, ilmuwan Bangladesh ini melihat proses ‘penciptaan pengetahuan’ yang hegemonik selalu melibatkan aktor-aktor yang merepresentasikan ‘kemajuan’. Dalam konteks Ban Huay Bong, representasi kemajuan dihadirkan oleh aktor-aktor seperti negara, agama, dan LSM.

Kepentingan aktivis LSM adalah menciptakan tatanan sosial dan realitas berdasarkan apa yang dibayangkannya. Tak heran bila wacana tradisional *rai mun wian* kemudian diakomodasi oleh mereka, dan disetujui oleh orang-orang Karen. Wacana yang diproduksi oleh aktivis LSM merupakan salah satu bentuk kepengaturan menurut Foucault (Mudhofir 2011; Foucault 2008). Wacana ini berperan dalam menertibkan pemaknaan komunitas lokal terhadap sesuatu (Foucault 2008). Wacana memiliki peran penting dalam proses kepengaturan dari LSM guna menghindari

kepengaturan dari negara. LSM tentu tidak memaksakan komunitas lokal agar mereka menuntut apa yang menjadi kepentingan mereka. Dengan kata lain, mereka hanya memberikan gambaran apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan korban sebagai bahan advokasi ke pemerintah.

Status *rai mun wian* dipakai untuk mendapatkan akses ke *counter-mapping*. Dengan dorongan LSM, mereka melakukan *shifting* identitas. Konsep *ra lu 'an 'loy* yang dilekatkan oleh pemerintah dan publik Thai pada orang Karen sebagai peladang diubah menjadi *rai mun wian* yang merupakan identitas tradisional orang Karen dan Luho saat belum mengenal *cash-crop*. Perubahan ini dianggap lebih menguntungkan. Mereka memainkan *positioning* agar konsep ini terkesan relevan di depan ideologi konservasi. Tidak mengherankan apabila contoh-contoh kearifan lokal yang ditampilkan dalam konsep *rai mun wian* diambil dari praktik tradisional orang-orang Karen yang kemudian diberi label konservasi lokal oleh orang Karen, akademisi, dan LSM (Lanugaramsri 2000). Pemaknaan ini bisa berubah karena adanya intervensi dari RFD dan LSM selaku agen pengusung ideologi konservasi. Mengingat konstruksi marjinalitas dan minimnya batas kekuatan mereka, maka mau tidak mau logika konservasi harus diterima dan disebarakan ke dalam komunitas agar dianggap sebagai kebenaran pengetahuan.

Konstruksi kebenaran ala LSM lebih diterima oleh komunitas sekitar karena negara sering hadir dengan relasi yang antagonistik dengan komunitas Karen. Memang orang-orang Karen berharap mendapat kemajuan yang bisa dihasilkan dengan masuk ke dalam skema inkorporasi negara melalui pemenuhan hak-hak kewarganegaraan. Akan tetapi, negara tidak bisa serta merta hadir dan menertibkan mereka melalui program pemetaan GPS partisipatif tanpa bantuan LSM yang dianggap sebagai sosok orang maju, modern, dan protagonis, karena memiliki rekam historis sebagai sekutu orang lokal saat melawan RFD. Dengan kata lain, simbol kemajuan yang dibawa oleh LSM membuat kepengaturan berjalan lebih mudah

Kehadiran taman nasional dan pembatasan akses para petani ke hutan yang juga disepakati oleh komunitas lokal pasca terciptanya konsensus pemetaan GPS partisipatif, bukan menjadi penanda bahwa utilitas hutan sebagai ruang produksi hilang. Hutan yang diproteksi ternyata didesain oleh pemerintah agar memiliki fungsi ekonomi sebagai situs ekowisata yang dikelola oleh warga lokal. Tidak heran apabila di Ban Huay Bong, sejak 10-12 tahun lalu, beberapa warga mulai membuka *guest house* dan warung klontong di pinggir-pinggir jalan. *Guest house* dan warung klontong ini dibangun dengan bantuan dana dari investor. Setiap kali ada tamu yang berkulit putih, pemilik *guest house* biasa memberikan harga 500-1000 Bath/malam. Jika yang datang merupakan tamu-tamu dari negara-negara Asia Tenggara maka harganya diturunkan menjadi 250-300 Bath/malam. Adapun biaya untuk melihat gajah milik warga adalah sebesar 100 Bath/pengunjung. Hampir semua warga memiliki gajah. Mereka juga mematok harga 20 Bath bagi tiap pengunjung yang ingin melakukan *tracking* di kawasan taman nasional. Pendapatan dari sektor ini memang belum sebanyak pendapatan dari sektor pertanian. Akan tetapi, pendapatan dari sektor ekowisata bisa menjadi alternatif pemasukan bagi warga lokal di saat musim panen belum tiba.

G. Kesimpulan

Program pemetaan GPS partisipatif di Ban Huay Bong bisa berjalan efektif tanpa ada resistensi langsung karena tujuh hal, yaitu: *Pertama*, selama bertahun-bertahun orang Karen hidup dalam insekuritas atas lahan karena tidak diakui hak mereka berdiam dan menguasai lahan di ruang hidupnya. Seiring makin kuatnya cengkeraman negara, hal tersebut menjadi begitu mengkhawatirkan sebab sewaktu-waktu mereka bisa direlokasi atau dengan mudahnya lahan pertanian mereka dialihfungsikan sebagai taman nasional yang berarti akses mereka benar-benar terputus. Oleh sebab itu, dengan diakuinya hak pakai oleh negara, rasa was-was yang selama ini melekatinya, bisa teratasi.

Kedua, Diterimanya ide konservasi dari LSM.

Konsekuensi logis dari penerimaan ide tentang konservasi ialah, hak-hak agraria mereka baru bisa dipenuhi jika mereka juga bersedia diatur demi kepentingan konservasi. Dengan nalar ini, peng-ekologian konsep *rai mun wian* menjadi masuk akal. Nalar ini pulalah yang membuat pemetaan GPS partisipatif bisa diterima oleh mayoritas warga Ban Huay Bong karena dalam program tersebut selain ada skema pengakuan hak, juga ada skema konservasi.

Ketiga, bisa bermigrasi dan bekerja di luar kota di bidang non-pertanian yang membuat kondisi lapar akan tanah tidak terlalu tinggi, sehingga sektor pertanian tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka.

Keempat, besarnya tingkat ketergantungan orang-orang Karen di Ban Huay Bong terhadap hutang, membuat mereka harus mengubah pola pikirnya. Pemasukkan harus lebih dihitung secara kalkulatif agar pembayaran utang tidak melebihi tempo. Selain itu, dengan batas-batas tanah yang jelas dan diakui oleh negara akses kredit juga lebih mudah didapat.

Kelima, peran LSM Raks Thai Foundation selaku pengusung ide program, membuat program ini bisa berjalan secara lebih efektif, karena mereka sudah mendapat cap positif dari orang Ban Huay Bong.

Keenam, penggunaan institusi lokal seperti: Komite Desa, Komite Gereja, dan dimasukkannya petugas surveyor dari warga desa lainnya, membuat proses kepengaturan bisa berjalan lancar karena kuasa-kuasa yang ada di ranah lokal terkumpul dan bisa satu suara mendukung program. Dengan cara ini kepengaturan akan lebih mudah dan efektif karena struktur-struktur sosial yang penting dalam hidup sehari-hari dilibatkan.

Ketujuh, orang Karen tidak tereksklusi dari hutan sebagai ruang produksi pasca program pemetaan GPS partisipatif. Penyebabnya adalah hutan di sekitar Mae Chaem ditetapkan sebagai situs ekowisata yang bisa mendatangkan tambahan pemasukan bagi warga lokal. Dengan kata lain, fungsi hutan sebagai ruang produksi tidak hilang.

Dengan demikian, penerimaan orang Karen di Ban Huay Bong terhadap program pemetaan GPS partisipatif disebabkan adanya pra-kondisi yang mengikat secara struktural yakni insekuritas atas akses ke tanah, semakin tingginya tingkat migrasi ke perkotaan, dan ketergantungan terhadap utang sebagai implikasi logis dari konstruksi marginalitas yang mereka alami selama ratusan tahun.

Selain itu, materialisasi pengetahuan melalui penciptaan peta baru hasil dari pemetaan GPS partisipatif yang menghasilkan produk kartografi yang lebih spesifik dan jelas batas serta peruntukannya juga relevan dengan konteks ekonomi-politik setempat.

Dorongan dari agen-agen di ranah lokal seperti LSM, anggota TAO & Komite Desa, hingga Komite Gereja yang perannya semakin kuat pasca inkorporasi penuh orang-orang Karen ke dalam skema kewarganegaraan Thailand dalam konstitusi 1997 juga membuat program pemetaan GPS partisipatif dianggap sebagai norma baru yang harus diterima. Tugas dari agen-agen ini di ranah lokal ialah mengoperasikan model pengaturan sosial yang dapat menciptakan hasrat, *habit*, dan sistem kepercayaan yang relevan dengan kepentingan negara neoliberal Thailand

Daftar Pustaka

- Bernstein, H 2009, *V.I. Lenin and A.V. Chayanov: Looking Back, Looking Forward*. Journal of Peasant Studies, pp. 55-81.
- Cocharane, Logan, Jon Corbett, Peter Keler 2014, *Impact of Community-based and Participatory Mapping*. Institute for Studies and Innovation in Community, University Engagement, University of Victoria.
- Delang, CO 2003, *Living at the Edge of Society*, Routledge, London.
- Dove, Michael 1993, *Smallholder Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation to the Ecology and Economy of the Tropical Forest*, *Economic botany* 47 (2), 136-147.

- Foucault, M 2008, *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*. New York, Palgrave MacMillan.
- Gine, X 2012, *Land Security in Rural Thailand*, s.l, World Bank.
- Hale, CR, 2006 *Activist Research v. Cultural Critique*, *Cultural Anthropology*, Vol. 21,(Issue 1), pp. 96-120.
- Harvey, D, 2005, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford University Press, New York.
- Karthik, Teegalapalli, Gopi Govindhan Veeraswami, Prasanna Kumar Samal, 2009, *Forest Recovery Following Shifting Cultivation: an Overview of Existing Research*, *Tropical Conservation Science*, Vol. 2(4), 374-387.
- Khan, MT 2013, *Theoretical Frameworks in Political Ecology and Participatory Nature/Forest Conservation: the Necessity for a Heterodox Approach and the Critical Moment*, *Journal of Political Ecology*.
- Khoo, Bo Teik 2010, *Social Movments and the Crisis of Neoliberalism in Thailand and Malaysia*. IDE Duscusion Paper, No. 238 (6).
- Laungaramsri, P 2000, *Redefining Nature: Karen Ecological Knowledge and the Challenge to the Modern Conservation Paradigm*, Dissertation, University of Washington, Washington.
- Li, TM 2007, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*, Duke University Press, Durham.
- Li, TM 2012, *The Will to Improve: Perencanaan, Pembangunan, dan Kekuasaan di Indonesia*, Marjin Kiri, Tangerang Selatan.
- Mudhoffir, AM 2011, *Governmentality dan Pemberdayaan dalam Advokasi Lingkungan: Kasus Lumpur Lapindo*, Pusat Kajian Sosiologi, Lab Sosio FISIP-UI., Volume Vol. 16, No. 1, pp. 49-75.
- Peluso, NL 1995, *Whose Woods Are These?*, *Antipode*, 274, pp. 383-406.
- Rambo, T 1981, *No Free Lunch: a Reexamination of the Energetic Efficiency of Swidden Agriculture*, University of Philippines and East-West Center, Hawaii.
- Ramprasad, V 2018, *Debt and Vulnerability: Indebtness, Institutions, and Smallholders Agriculture in South India*, *Journal of Peasant Studies*.
- Reyes-García, V, Gueze, M, Orta-Martinez, M & Luz, AC, 2012, *Does Participatory Mapping Increase Conflicts? A Randomized Evaluation in the Bolivian Amazon*, *Applied Geography*, p. 34.
- Santasombat, Yos 2004, *Karen Cultural Capital and the Political Economy of Symbolic Power*, *Asian Ethnicity*, 5, no.1, pp. 105-120
- Schmidt-Vogt, D 1998, *Defining Degradation: the Impacts of Swidden on Forests in Northern Thailand*, *Mountain Research and Development*, 135-149.
- Trakansuphakon, Prasert 1997, *Transmission of Body Knowledge Relating to the Shifting Cultivation System of Karen Community*, Non-Formal Education Master Thesis, Chiang Mai University, Thailand.
- Walker, A & Forsyth, T, 2007, *Forest Guardians, Forest Destroyers: the Politics of Environmental Knowledge in Northern Thailand*, University of Washington, Washington.
- Waraluck, I 1998, *Rai Mun wian: Manda Haeng Phan Phuet Swidden Agriculture: Mother*, B.S. Printing, Chiang Mai.
- Winichakul, T 1997, *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*, 3rd penyunt, University of Hawaii, Hawaii.